

EFEKTIVITAS KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM DUNIA PEKERJAAN DI INDONESIA

Oleh

¹Herawati syamsul

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar

¹beraandipatta@gmail.com

ABSTRAK: Jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam membangun kekuatan ekonomi keluarga, tanpa harus kehilangan jati diri sebagai sosok seorang wanita maupun sosok seorang ibu, keterlibatan dalam aktivitas dalam bekerja merupakan bentuk kemandirian yang memiliki irama dan nilai social yang menentukan karakter diri, karakter keluarga juga mampu membuka peluang untuk membangun generasi anak anak mereka agar lebih tegar dalam mengarungi samudra kehidupan

Keyword : kemandirian, pekerjaan, semangat, figure, aktivitas

EFFECTIVENESS OF INDEPENDENCE OF WOMEN IN THE WORK WORK IN INDONESIA

By

¹Herawati Syamsul

Lecturer at the Makassar College of Economics

¹beraandipatta@gmail.com

ABSTRACT: This type of qualitative research through a phenomenological approach, while the results of the study show that women have the ability to take part in building family economic strength, without losing their identity as a woman or a mother, involvement in work activities is a form of independence that has rhythms and social values that determine self character, family character is also able to open opportunities to build their generation of children to be more rigid in navigating the ocean of life

Keyword: independence, work, enthusiasm, figure, activity

A. Latar Belakang

Kaum perempuan hari ini tidak hanya beraktifitas di ranah domestik saja. Namun, di dalam masyarakat telah terjadi perubahan paradigma mengenai peran perempuan di ranah publik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa gerakan sosial feminisme yang berkembang mulai abad ke-18 telah menjadi salah satu penanda terbukanya ruang publik bagi perempuan. Dimulai dengan munculnya gerakan feminisme liberal yang mengajukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, yaitu menghentikan marginalisasi perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan yang memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap pekerjaan dan imbalan ekonomi (M. Fakhri: 2009).

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Namun sampai saat ini banyak wanita yang masih terabaikan karena kurangnya informasi dan kurangnya menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara. Secara umum masih sedikit yang menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *gender spesifik*, artinya persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau satu kelompok orang menyangkut gender perempuan. Masih banyak yang tidak bisa mengerti mengapa persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus.

Hal ini terjadi karena kentalnya nilai-nilai laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai/norma di dalam masyarakat telah menetapkan bahwa sudah kodratnya perempuan merupakan “ratu dan pengurus rumah tangga”, sehingga pikiran-pikiran untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat dan mengada-ada (Tjandraningsih,1996).

Mereka juga belum menyadari adanya kepentingan kesetaraan berpartisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang disebabkan oleh perpanjangan keisolasian (Hubeis, 1998). Hal ini antara lain disebabkan karena lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung, untuk membiarkan wanita berpartisipasi dalam politik dan penentu keputusan nasional, dan adanya kelembagaan yang masih terus membatasi wanita pada kekuasaan marginal.

Salah satu kebutuhan yang sangat mendorong usaha pembangunan adalah memperbaiki kehidupan rakyat tanpa perbedaan, dalam arti meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat yang kurang berpotensi, baik itu laki-laki maupun perempuan utamanya masyarakat pengangguran atau yang tidak memiliki pekerjaan.

Secara mendasar tugas tersebut merupakan tugas seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dalam kemajuan suatu negara. Peranan pemerintah dalam pembangunan merupakan keharusan yang bersifat mutlak, karena itu pelaksanaannya oleh aparat pemerintah yang diberikan wewenang harus cukup bijaksana, mampu dan terampil. Kebijaksanaan dalam keterampilan terletak pada kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam masa pembangunan sekarang ini.

Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terasa, hal ini disebabkan karena konstruksi sosial yang telah berhasil mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai kehidupan. Menurut analisis gender adanya perbedaan sex antara perempuan dan laki-laki bukan berarti harus pula dibeda-bedakan tugas dan fungsi mereka dalam masyarakat

karena pada dasarnya kemampuan manusia itu sama, namun karena adanya sebuah konstruksi sosial yang telah berhasil memetakan pola kehidupan antara peran perempuan dan peran laki-laki di dalam masyarakat, yaitu laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat dibanding dengan perempuan sehingga mereka diberi tanggung jawab sebagai pekerja dibidang produksi, sementara perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah lembut sehingga mereka hanya cocok sebagai pekerja ibu rumah tangga atau pekerja domestik.

Pertumbuhan generasi suatu bangsa pertama kali berada di tangan ibu. Di tangan seorang ibu pulalah pendidikan anak ditanamkan dari usia dini. *Neuman (1990)* berpendapat bahwa usia 20-22 bulan merupakan masa penting hubungan ibu-anak dan pembentukan diri individu, yang disebut Neuman primal relationship. Para ahli social learning berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya merupakan proses yang diadopsi oleh si anak melalui proses social-modelling. Dalam era reformasi ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dibidang politik telah diwujudkan dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden yang juga selaku Kepala Negara memegang pimpinan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini merupakan kebanggaan kita bersama.

Peraturan Hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substansi hukum positif, meskipun pemerintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai sosial yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

Peran yurisprudensi yang berperspektif gender, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dimaksud, sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan penerapan dan penegak hukum yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri. Perlu dipahami bahwa fenomena wanita berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja diluar rumah, dan juga sebagai pemimpin wanita sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pada awal abad 19, di luar negeri wanita yang sebelumnya berfungsi sebagai pekerja terampil pada usaha-usaha rumah tangga yang memproduksi sampai memasarkan mulai beralih. Dampak dari revolusi industri membuat wanita banyak berpaling untuk melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi dan menambah penghasilan keluarga. Menurut data statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) tahun 2003 – 2005. Pada tahun 2003 angkatan kerja wanita mencapai 35,479,000 atau 35.36% dari angkatan kerja keseluruhan, 25.55% dari 35 juta tersebut merupakan

pekerja di sektor publik. Tahun 2004 angkatan kerja wanita naik menjadi 38,046,000 atau 34.66 % dari angkatan kerja keseluruhan, 27.58 % bekerja di sektor publik. Tahun 2005 juga mencatat kenaikan angkatan kerja wanita yang mencapai 39,580,488 atau 37.40 % dari angkatan kerja keseluruhan, 26.98% dari angka tersebut merupakan pekerja sektor publik.

Bekerja bagi setiap wanita adalah sebuah pilihan. Gerson (1985, dalam Nainggolan, dkk, 1996:78) menyatakan bahwa keputusan wanita untuk bekerja dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya kumulatif, interaktif dan terus berkembang dipengaruhi baik secara langsung atau tidak dari masyarakat, keluarga dan diri sendiri sehubungan dengan harapan-harapan tertentu terhadap peran wanita yang sekaligus ibu. Keputusan untuk mengambil dua peran berbeda yaitu di rumah tangga dan di tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan masyarakat. Tuntutan dari diri sendiri dan sosial ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. Idealnya memang setiap wanita bisa menjalani semua peran dengan baik dan sempurna, namun ini bukanlah hal mudah. Banyak wanita berperan ganda mengakui bahwa secara operasional sulit untuk membagi waktu bagi urusan rumah tangga dan urusan kantor (Izzaty, 1999). Dalam Hurlock (1992) bahwa wanita tidak menyukai kalau harus melaksanakan beban tugas ganda, satu tugas dalam dunia perkantoran dan satu lagi tugas rumah tangga. Wanita merasa bersalah karena menolak tugas rumah tangga, contohnya dari sekian banyak tugas rumah tangga hanya tugas merawat anak yang dapat dilakukan atau bahkan tugas ini dilakukan oleh baby sitter. Akibatnya bagi wanita pekerja, maka kehidupan rumah tangga mereka merasa tidak memuaskan. Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, banyak permasalahan yang penulis dapatkan, permasalahan tersebut antara lain : 1). Apakah kelemahan dan kelebihan perempuan yang bekerja ?, 2). Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap perempuan yang bekerja ?, 3). Bagaimana respon masyarakat apabila perempuan bekerja ?

B. Tinjauan Pustaka

1. Kondisi Perempuan Indonesia

Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa kondisi perempuan di Indonesia masih banyak memerlukan perhatian. Di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal dibandingkan mitra lakilaki. Sementara bahan ajar yang digunakan serta proses pengelolaan pendidikan masih bias gender, sebagai akibat dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan pendidikan (Soemartoyo, 2002).

Di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50 persen sampai 80 persen upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau

pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan kena dampak.

Di bidang pengambilan keputusan dan politik perempuan hanya diwakili oleh 8,8 persen dari seluruh jumlah anggota DPR. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung hanya 13 persen. Jumlah PNS perempuan 36,9 persen, dan dari jumlah tersebut hanya 15 persen yang menduduki jabatan struktural. Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa peran perempuan sebagai pengambil kebijakan relatif kecil dibanding peran laki-laki.

2. Ketidakadilan dan diskriminasi gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki. Menurut Fakih (1996), bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi :

3. Marginalisasi

Perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seorang ibu, keseimbangan antara kegiatan dan pembinaannya sangat diperlukan untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses pendidikan dan komunikasi anak. Kenyataan menunjukkan bahwa wanita pedagang sebagai bagian dari komunitas sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam skala makro maupun mikro (rumah tangga). Pendapatan mereka cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pembiayaan pendidikan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pembelian kekayaan lain seperti kekayaan yang bergerak: kendaraan bermotor, juga perabot rumah tangga dan perhiasan, barang elektronik dan kekayaan tidak bergerak yang berupa tanah dan rumah. Berdasarkan penjelasan diatas maka pembahasan studi perempuan dalam berbagai literatur memberi berbagai macam perspektif menyangkut fungsi, peran dan kedudukan perempuan baik didalam lingkungan keluarga maupun rumah tangga maupun di dalam lingkup

4. Sektor masyarakat.

Pembagian kerja secara seksual antara perempuan dan laki-laki pada beberapa kasus memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan yang signifikan yang memandang pembagian fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga tidak lagi harus bersifat kaku dan mutlak. Di Makassar khususnya di pasar sentral memperlihatkan bahwa sebagian besar dari pedagang yang melakukan aktifitas perdagangan adalah mayoritas kaum wanita yang telah berkeluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar wanita pedagang di pasar sentral memiliki aktifitas yang sangat padat menyangkut pembagian fungsi mereka didalam dan diluar rumah. Pembagian fungsi ini memerlukan manajemen waktu yang sangat akurat dan tepat serta seimbang sehingga fungsi wanita tersebut dalam hal aktifitas perdagangan dan pembinaan keluarga utamanya anak dapat berjalan baik dan seimbang. Wanita Pedagang yang memiliki anak berangkat dari berbagai fenomena diatas memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan terhadap Peran Ganda Wanita Pedagang, yang berlokasi di pasar sentral makassar kecamatan Wajo.

5. Pendekatan berwawasan gender

Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluangnya juga makin besar. Pembangunan diprovinsi, kabupaten, dan kota pada umumnya belum menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas (Soemartoyo, 2002).

Untuk dapat lebih mengenai sarannya dengan tepat diperlukan pendekatan pembangunan yang tepat pula. Gender mengidentifikasi hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, yang tidak ditetapkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih dipertajam oleh perbedaan pembelajaran dan nilai-nilai budaya. Perbedaan biologis menetapkan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan menurut kesepakatan masyarakat. Gender yang didasarkan pada perbedaan nilai-nilai menentukan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan dan kesetaraan perempuan.

Pendekatan JDP (Jender dan Pembangunan) mengacu pada desain program yang mengintegrasikan dan memainstreamkan aspirasi, kebutuhan, dan minat dari gender (laki-laki dan perempuan) dalam semua aspek pembangunan (Vitayala, 1995). Karena itu perencanaan dan implementasi program dikembangkan lebih banyak untuk mencakup kebutuhan strategis gender. Sedangkan pendekatan WDP (Perempuan dalam Pembangunan) didesain untuk menjembadani Analisis gender adalah sebagai alat analisis konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Gender berarti perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan *bukan kodrat Tuhan*, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.

Caplan (1978) menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara pria dan wanita selain disebabkan faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat. Sementara jenis kelamin (sex) tidak berubah (Fakih, 1996). Peran gender ternyata menimbulkan masalah yang perlu dipersoalkan, yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh pembedaan gender tersebut. Dalam upaya penyeimbangan hak gender, upaya penyadaran gender meliputi pemahaman perbedaan peran biologis dan peran gender sekaligus memahami bahwa peran gender yang ditentukan melalui konstruksi sosial dan historis dapat berubah/diubah (Suradisastra, 1998). Kesadaran gender berarti laki-laki dan perempuan bekerja bersama dalam suatu keharmonisan cara, memiliki kesamaan dalam hak, tugas, posisi, peran dan kesempatan, dan menaruh perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik yang saling memperkuat dan melengkapi (Vitayala, 1995).

Hal ini berarti bahwa laki-laki maupun perempuan dapat berperan sebagai pencari nafkah baik dibidang pertanian maupun non pertanian, pelaku kegiatan rumah tangga, maupun pelaku kegiatan masyarakat. Peran-peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai/norma masyarakat, lingkungan fisik dan sosial, program-program pembangunan, dan kondisi sosila ekonomi keluar atau rumah tangga. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, komposisi anggota rumah tangga (Hastuti, *et.al.*, 1998).

6. Karakteristik wanita bekerja

Wanita yang bekerja menghabiskan rata-rata 7 sampai 9 jam dalam satu hari, atau 42 sampai 54 jam dalam satu minggu di kantor. Berarti ia hanya memiliki sisa waktu dua pertiga dari wanita yang tidak bekerja. Waktu ini masih harus ia atur untuk pengasuhan anak, mengurus suami, bersosialisasi dengan keluarga besar dan lingkungan sosial, serta untuk mengurus diri wanita itu sendiri. Konsekwensi yang harus dihadapi adalah terbaginya waktu dan perhatian antara urusan di rumah tangga dan urusan pekerjaan di kantor. Bagi para wanita, waktu kerja yang panjang ditambah oleh tuntutan pekerjaan rumah tangga menyulitkan mereka untuk mengasuh anak dan mewujudkan *attentive parenting* (Hochschild, 1989, dalam Widyawati & Tulus, 2007).

Sementara dampak fisik dan pengaruh psikologis yang ia dapatkan dari aktivitas kerja adalah dengan tercurahnya perhatian wanita pada pekerjaan, maka sebagian besar energi dan waktu terbagi. Biasanya tenaga kerja wanita bekerja pada pagi hari sampai sore. Pada waktu tersebut kondisi fisik sedang prima dan selanjutnya wanita yang bekerja akan pulang ke rumah dengan sisa energi yang ada. Sulit bagi mereka yang bekerja misalnya sebagai buruh pabrik untuk menghemat penggunaan energinya, karena bagi tenaga buruh ini, aktivitas fisik serta konsentrasi merupakan fokus utama pekerjaannya. Hal yang paling umum dikeluhkan pada wanita bekerja, terutama yang baru memulai pekerjaan salah satunya dampak pada faktor relasional dengan suami. Karena wanita mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk memberi kesan bagus di

pekerjaan (Brizendine, 2006). Jika komunikasi tidak berjalan efektif, dan dukungan suami dirasakan kurang, maka sangat mungkin menimbulkan masalah perkawinan.

7. Motivasi wanita bekerja

Apakah yang sebenarnya melandasi tindakan para ibu tersebut untuk bekerja di luar rumah, atau motif-motif apa saja yang mendasari kebutuhan mereka untuk bekerja di luar rumah, hingga mereka mau menghadapi berbagai resiko atau pun konsekuensi yang akan dihadapi. Berikut ini adalah beberapa diantaranya (Jacinta F. Rini, 2002):

a. Kebutuhan finansial

Terutama pada masyarakat kelas ekonomi bawah, seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat wanita tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun ia sebenarnya tidak ingin bekerja.

b. Kebutuhan sosial-relasional

Ada pula ibu-ibu yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas social yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalani. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi, adalah bagian dari proses penemuan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi. Bagi wanita yang sejak sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka ia akan cenderung kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa bekerja dan pekerjaan adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, menyokong *sense of self* dan kebanggaan diri, selain mendapatkan kemandirian secara finansial.

8. Manfaat Bekerja Bagi Wanita

Bekerja mempunyai manfaat positif bagi wanita bekerja maupun bagi keluarga. Beberapa segi positifnya adalah (Jacinta F. Rini, 2002):

1). Mendukung ekonomi rumah tangga

Dengan bekerjanya istri, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal : gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan

2). Meningkatkan harga diri dan pementapan identitas

Bekerja, memungkinkan seorang wanita mengekspresikan dirinya sendiri, dengan carayang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya; dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

3). Relasi yang sehat dan positif dengan keluarga

Wanita yang bekerja, cenderung mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi, sehingga cenderung mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, lebih energik, mempunyai wawasan yang luas dan lebih dinamis. Dengan demikian, keberadaan istri bisa menjadi partner bagi suami, untuk menjadi teman bertukar pikiran, serta saling membagi harapan, pandangan dan tanggung jawab.

4). Pemenuhan kebutuhan social

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan “kebersamaan” dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas, untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial. Hal yang terpenting, adalah untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan stres, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan kerja, mereka dapat saling *sharing*, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.

5). Peningkatan *skill* dan kompetensi

Dengan bekerja, maka seorang wanita harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan *skill* dan kompetensi. Untuk itu, seorang wanita dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan *skill* dan kompetensi yang terus menerus akan mendatangkan nilai lebih pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang mantap.

9. Hambatan social budaya yang mempengaruhi karir perempuan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran gender perempuan baik di dalam kegiatan rumah tangga maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Beberapa faktor pembatas menurut Licuanan (*dalam* Suradisastra,1998) adalah sebagai berikut: Status gender perempuan terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan, kesehatan, dan posisi dalam proses pengambilan keputusan umumnya memberikan dampak tertentu terhadap produktivitas mereka. Rumpang lebar yang terjadi antara pencapaian pendidikan laki-laki dan perempuan, disertai kenyataan bahwa perempuan secara umum kurang memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan telah menciptakan konsekuensi kritis terhadap perempuan dalam peran produktif dan reproduktif mereka.

10. Hambatan Memperoleh Pekerjaan

Peluang gender tertentu guna memperoleh pekerjaan sering dihubungkan dengan norma tradisional. Pada umumnya pekerjaan gender perempuan dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga. Pekerjaan gender perempuan juga sering dinilai berkarakter rendah, bersifat marginal, dan mudah disingkirkan. Selain itu gender perempuan menghadapi hambatan mobilitas relatif. Dalam hal ini perempuan seringkali enggan bekerja jauh secara fisik, karena mereka diharapkan selalu berada dekat dengan anak-anaknya.

- a. Status Pekerjaan; Sering terjadi pembedaan posisi untuk gender yang berbeda. Perempuan sering memperoleh posisi yang lebih rendah dari rekannya laki-laki. Demikian juga sering terjadi imbalance yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Dari segi teknologi, gender tertentu seringkali mengalami lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya.
- b. Beban Ganda; Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga. Sementara laki-laki hanya mempunyai tuntutan peran sekuental.

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Positif ibu Bekerja

Ibu yang bekerja akan memiliki penghasilan yang dapat menambah pendapatan rumah tangga. Mereka yang bekerja lebih memiliki akses dan kuasa terhadap pendapatan yang dihasilkan untuk digunakan untuk keperluan anak mereka (UNICEF, 2007). Para ibu akan lebih memilih membeli sesuatu seperti makanan bergizi berimbang yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pangan anak mereka (Glick, 2002). Jika kebutuhan pangan anak terpenuhi, maka status gizi anak pun menjadi baik. Essortment (2002) dalam McIntosh dan Bauer (2006), juga mengatakan bahwa dengan pendapatan rumah tangga

yang ganda (suami dan istri bekerja), banyak wanita lebih mampu menentukan banyak pilihan untuk keluarga mereka di dalam hal nutrisi dan pendidikan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Gennetian *et al.* (2009), bahwa ibu yang bekerja memiliki kemampuan untuk membeli makanan berkualitas tinggi, kebutuhan rumah tangga lainnya dan biaya kesehatan. Walaupun ibu bebas memilih untuk membeli makanan, hal ini tergantung pendidikan ibu tentang gizi. Ibu yang tidak tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tentunya akan berbeda dalam hal memilih makanan dengan ibu yang tamat pendidikan SMA.

Mereka yang memiliki pengetahuan cukup tentang gizi, akan memilih makanan yang memiliki nutrisi lebih baik, yaitu makanan yang mengandung makronutrien dan mikronutrien yang berguna bagi tubuh. Para ibu yang berpendidikan juga lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih modern dan memahami pesan-pesan kesehatan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga kesehatan (Moestue dan Huttly, 2008).

Selain penampilan makanan yang dapat menambah selera makan anak, faktor gizi juga harus dipertimbangkan dalam memilih makanan (Sediaoetama, 2006). Maka dari itu, jika seorang ibu yang bekerja tidak dapat mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan anak dengan baik dan bijaksana, akan timbul efek negatif (Glick, 2002). Menurut Sediaoetama (2008), pemenuhan kebutuhan gizi baiknya dimulai dari anak balita (bawah lima tahun), karena pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan anak menentukan tingkat kecerdasan otak pada saat anak tersebut dewasa. Ali Khomsan (2010) juga mengatakan bahwa, periode perkembangan otak anak yang rawan gizi dimulai dari saat dalam kandungan ibunya hingga berusia dua tahun. Jika pada saat mengandung gizi ibu terpenuhi, maka anak akan terhindar dari cacat bawaan. Mereka pun lebih aktif daripada anak dengan ibu gizi kurang saat kehamilan. Ibu yang kurang gizi saat kehamilan biasanya akan melahirkan anak dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Dampak positif ibu bekerja dapat juga dilihat dari efek yang didapat apabila anak mereka dititipkan di tempat penitipan anak. Mereka yang dititipkan di tempat penitipan anak yang memperkerjakan pengasuh terlatih, memiliki interaksi sosial yang baik, perkembangan kognitif yang pesat, dan lebih aktif jika dibandingkan dengan anak yang hanya berada di rumah bersama ibunya yang tidak bekerja (McIntosh dan Bauer, 2006). Gershaw (1998) dalam McIntosh dan Bauer (2006) mengatakan bahwa, anak dengan ibu yang bekerja memiliki tingkat intelegensi lebih tinggi.

2. Dampak Negatif Ibu Bekerja

Seperti yang telah disebutkan di atas, jika seorang ibu yang bekerja tidak memiliki kuasa penuh atas penghasilannya, maka kebutuhan pangan anak kurang terpenuhi. Akibatnya anak mereka akan mengalami gizi kurang bahkan menjadi gizi buruk. Anak menjadi lebih pendek daripada anak lain seusianya dan lebih rentan terkena penyakit seperti infeksi (Glick, 2002). Status gizi kurang atau gizi buruk yang dialami balita juga dapat terjadi akibat memendeknya durasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) oleh ibu karena harus

bekerja (Glick, 2002). Banyak dari mereka yang kembali bekerja saat anak mereka masih di bawah umur 12 bulan (Engle, 2000). Hogart *et al.* (2000) dalam Reynolds (2003) juga mengatakan bahwa sekitar satu pertiga dari ibu yang bekerja saat mengandung, kembali bekerja penuh waktu saat anak mereka berusia 11 bulan. Mereka kembali bekerja pada saat awal kehidupan bayi mereka, yaitu saat-saat kritis di mana perkembangan otak sedang berlangsung dan membutuhkan ASI sebagai nutrisi utama. Rekomendasi dari WHO, ASI eksklusif sebaiknya diberikan dalam enam bulan pertama kelahiran, diteruskan sampai umur 1-2 tahun (Ong *et al.*, 2001). Sedangkan rekomendasi bulan pertama kelahiran, diteruskan sampai umur 1-2 tahun (Ong *et al.*, 2001).

Sedangkan rekomendasi dari *The American Academy of Pediatrics* (AAP), diharapkan para ibu untuk memberikan ASI eksklusif enam bulan setelah kelahiran dan diteruskan sampai anak berumur satu tahun (Murtagh dan Anthony D, 2011). Ong *et al.* (2001), dalam penelitiannya mendapatkan bahwa faktor pendidikan ibu juga mempengaruhi lamanya durasi pemberian ASI oleh ibu-ibu yang bekerja. Akibat jam kerja, waktu kebersamaan atau *quality time* antara ibu dan anak pun akan berkurang (Glick, 2002). Sehingga perkembangan mental dan kepribadian anak akan terganggu, mereka lebih sering mengalami cemas akan perpisahan atau *separation anxiety* (Mehrota, 2011), merasa dibuang dan cenderung mencari perhatian di luar rumah (Mehrota, 2011), serta kenakalan remaja (Tjaja, 2008).

Hal ini dikarenakan akibat jadwal kerja yang terlalu sibuk, mengakibatkan para ibu tidak dapat mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan anak (Fertig *et al.*, 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soekirman (1985) dalam Glick (2002), ibu yang bekerja selama lebih dari 40 jam perminggunya memiliki dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Selain kualitas, kuantitas interaksi antara ibu dan anak juga akan berkurang (AAP, 1984). Menurunnya frekuensi waktu kebersamaan ibu dan anak juga disebabkan oleh tipe kerja ibu. Ibu yang memiliki pekerjaan yang dikategorikan berat dapat mengalami kelelahan fisik. Akibatnya sesampainya ibu di rumah terdapat kecenderungan mereka lebih memilih untuk beristirahat daripada mengurus anaknya terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fertig *et al.* (2009), ibu yang bekerja tidak dapat mengatur pola makan anak, membiarkan anak-anak mereka makan makanan yang tidak sehat, selalu menghabiskan waktu di depan televisi, dan kurang beraktivitas di luar rumah.

Hal ini berakibat status gizi anak menjadi lebih atau obesitas (Fertig *et al.*, 2009). Jarak rumah dengan tempat kerja juga menjadi faktor pengganggu. Mereka yang bekerja di luar negeri tentunya frekuensi berjumpa dengan anak dan suami mereka lebih sedikit daripada para ibu yang bekerja di tanah air. Keharmonisan di dalam keluarga pun akan berkurang (Tjaja, 2008). Menurut Joeekes (1989) dalam Glick (2002), ibu bekerja di negara berkembang lebih memilih untuk mencari pengasuh pengganti untuk anak balita mereka. Anak mereka biasanya dijaga oleh anak yang lebih tua atau oleh kerabat dikarenakan keterbatasan finansial. Keterlibatan anak yang lebih tua sebagai pengasuh pengganti, dapat menyebabkan anak tersebut putus sekolah (Glick, 2002).

Glick (2002) juga mengatakan bahwa, kebanyakan dari mereka yang menjadi pengasuh pengganti adalah anak perempuan yang lebih tua. Jika anak perempuan dalam suatu keluarga harus putus sekolah demi menjaga adiknya yang berumur di bawah lima tahun, maka rantai gizi buruk pun akan terulang kembali. Mereka yang tidak berpendidikan, tidak memiliki pengetahuan cukup tentang gizi yang berakibat fatal bagi status gizi anak apabila mereka menjadi ibu kelak. Lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak berpendidikan hanya sebatas di sektor informal seperti pembantu rumah tangga yang gajinya tentu tidak lebih tinggi dari sektor formal seperti pegawai kantoran. Selain anak perempuan yang lebih tua, para kerabat ibu juga sering menjadi pengasuh pengganti.

Diantaranya adalah ibu mereka sendiri atau sang nenek yang sudah memiliki pengalaman dalam hal mengurus anak. Status gizi anak dapat menjadi baik apabila pengasuh pengganti memiliki pengalaman dan pendidikan tentang mengasuh anak dan pengelolaan gizi anak (Glick, 2002). Pengalaman pengasuh pengganti dapat menjadi faktor perancu. Sedangkan di negara maju, di mana sudah tersedia jasa tempat penitipan anak atau *daycare centre*, para ibu lebih memilih menitipkan anak mereka di sana saat mereka harus bekerja. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup bagi masyarakat sangat dirasakan pada saat ini. Wanita yang bekerja bukan suatu hal yg sangat aneh untuk jaman sekarang dimana kehidupan yang kian sulit memberi peluang bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi ataupun untuk menambah penghasilan keluarga. Pada abad pertengahan wanita hanya sebagai pelayan suami dan sebagai pengasuh untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Secara totalitas kehidupan wanita pada abad ini hanya untuk kelangsungan keluarga . Tapi pada jaman sekarang ini banyak negara yang perekonomian keluarganya ditunjang dari wanita bekerja. Mereka bekerja mempunyai alasan yang berbeda-beda. Sebut saja Sally, dia bekerja sebagai sekretaris di salah satu perusahaan terkenal. Menurut dia, wanita bekerja dewasa ini kian banyak karena dari segi pendidikannya banyak wanita yang sudah memiliki gelar pendidikan sehingga cara berpikir dan pergaulan menuntut wanita untuk lebih kreatif dalam kelangsungan kehidupan pribadi maupun keluarganya. Lain dengan Lani, seorang buruh dari sebuah pabrik garmen, dia mengatakan bahwa wanita bekerja mempunyai andil dalam hal menunjang perekonomian keluarga dimana penghasilan suami tidak cukup menunjang untuk kebutuhan rumah tangganya setiap bulan. Selain untuk menunjang perekonomian keluarga, dia juga menambahkan bahwa dengan bekerja seorang wanita mendapatkan banyak teman dan menambah wawasan sehingga banyak sekali hal-hal di luar rumah didapat dari bekerja. Hal seperti ini mungkin mempunyai dampak positif dan negatif. Positif jika les tersebut dapat diikuti oleh sang anak. Sisi negatifnya adalah waktu bermain untuk anak hanya diisi oleh kegiatan belajar sehingga masa kanak-kanak yang seharusnya dinikmati oleh setiap anak menjadi suatu hal yang sangat mahal harganya. Dihadapkan dengan dua dilema tersebut yaitu sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga maka wanita sebaiknya dapat membagi waktu dalam keluarga sehingga hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan sebaik-baiknya. Dukungan dari pasangan hidup sangat dibutuhkan bagi seorang wanita bekerja karena dengan demikian semua

permasalahan dalam rumah tangga dapat ditanggung bersama tanpa harus berselisih pendapat.

3. Bentuk kebijakan pemerintah terhadap perempuan yang bekerja

Pembahasan mengenai konflik peran yang dihadapi wanita bekerja merupakan bagian dari isu global tentang kesejahteraan keluarga secara umum. Mengenai kesejahteraan keluarga, akan tercakup didalamnya peran dan fungsi wanita baik sebagai objek maupun subjek dari sistem dunia kerja yang lebih luas. Maka cakupan pembahasan tentang hal tersebut akan melibatkan dan menuntut partisipasi perusahaan yang bersinggungan langsung dan memiliki hubungan saling ketergantungan dengan tenaga kerja wanita. Peran pemerintah pun sangat menentukan dalam hal ini. Melihat fungsi pemerintah sebagai pengayom dan penjamin kesejahteraan masyarakatnya, maka pemerintah memiliki kepentingan yang cukup besar pada perusahaan dan tenaga kerjanya. Selayaknya pemerintah mampu memposisikan diri sebagai mediator serta fasilitator yang juga turut menentukan aturan main ketenagakerjaan. Pemerintah dapat mengacu dan mengadopsi kebijakan serta program-program yang dilakukan oleh negara-negara lain yang kurang lebih memiliki karakteristik kondisi ekonomi dan sosial kultural mirip dengan Indonesia.

Dalam lingkup internasional, lembaga Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melalui *division for social policy and development departement of economic and social affairs*, mengajukan program-program dan pelayanan sosial yang dapat dilakukan sebagai bentuk peningkatan *family policies*. Lembaga ini melakukan survey di delapan negara di dunia mengenai program-program dan pelayanan sosial yang dilakukan negara-negara tersebut. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menguatkan keluarga serta mendorong peningkatan bidang sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan keluarga sebagai kerangka acuan dalam bertindak. Pelayanan sosial yang diterapkan merupakan tindakan langsung dan spesifik, Misalnya menyediakan *day care, public housing*, dan sumbangan atau subsidi keuangan bagi masyarakat ekonomi lemah. Namun ada juga yang memberi pengaruh tidak langsung pada keluarga. Misalnya dengan memberikan konseling dan bimbingan pada keluarga serta memberi dukungan informasi pada pembuat keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Terdapat tujuh hal yang menjadi isu sentral dalam pembentukan *family policy*, yaitu program bantuan untuk masyarakat miskin yang bertujuan untuk membantu keperluan pengasuhan anak dari segi ketersediaan dana, hal ini termasuk bagi orang tua tunggal, penyediaan *child care*, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan meningkatnya jumlah wanita yang masuk dunia kerja, Kesehatan, Pendidikan, diarahkan untuk merancang bentuk dukungan yang dapat disediakan untuk meningkatkan peran orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Pendidikan juga diarahkan untuk menghindari terjadinya perkembangan pola interaksi negatif maupun masalah-masalah psikologis pada anak dan remaja, Konseling, yang disediakan untuk menangani masalah pernikahan, seperti konflik dengan pasangan (termasuk karena masalah pekerjaan), kegagalan pernikahan, kemiskinan dan masalah kebutuhan rumah tangga, serta menghadapi situasi stres dan tekanan, 6) *families of indigenous*

population, peran ayah dalam keluarga, isu ini diarahkan untuk mendidik pasangan suami istri agar menyadari dan memahami tentang pernikahan dan memiliki keterampilan mengasuh anak. Para ayah didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses membesarkan anak (United Nation, 2001). Adanya kebijakan, fasilitas dan kegiatan yang dibuat oleh perusahaan dan pemerintah untuk mendukung tenaga kerja wanita agar tetap dapat berperan ganda tanpa harus mengalami konflik peran, merupakan bentuk *social support* yang sangat berarti.

D. Kesimpulan

Kehidupan bekerja pada sebagian besar wanita menjadikan wanita tersebut menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi bagaimana kendala yang dihadapi oleh sebagian besar wanita bekerja? Siapa yang menjadi korban dari semua hal itu karena dilihat dari kodratnya bahwa setiap wanita merupakan ibu rumah tangga dengan kata lain adalah mengasuh anak-anak di rumah?. Jawaban yang sangat tepat adalah anak-anak mereka. Banyak anak-anak menjadi korban dari kurangnya perhatian orangtua karena orang tua mereka sangat sibuk bekerja, pergi pagi dan pulang malam. Karena sibuk bekerjanya maka kegiatan belajar bagi anak-anak sering terbengkalai dan akibatnya anak-anak kurang perhatian terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Banyak orangtua berlomba-lomba ingin memberikan les tambahan diluar dari jam sekolah, dan biasanya mereka melakukan hal tersebut karena kesibukan yang mereka miliki sehingga dengan memasukkan anak-anaknya ditempat les yang baik maka dijamin kegiatan belajar anak-anaknya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2006. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan)*. Bandung : Alfabeta
- APPEAL. 1996. *Pendidikan Berkelanjutan: Arab dan Kebijakan Baru*. Bangkok: Ditjen Diklusepora dan UNESCO
- De vries, Dede William. 2006. *Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: Center for International Forestry
- Bardoel, E.A., De Cieri. 2007. 'Reconciling Work and Family Responsibilities : a global Perspective', *Proceeding of international conference*. UBAYA : Surabaya.
- Brizendine, Louann. 2006. *The Female Brain*. UFUK Press.
- Batam Pos. 2007. *Selalu Terlupakan Masalah Buruh Wanita*. <http://www.batampos.co.id>.
- Dowling, Sophie. 2008. *Analisis Gender sebuah Pengantar*. Kalimantan:Resource.mjmp' 70h
- Management in Asia-Pacific Program Australian National University
- Fakih, Mansur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus, R. B. et al. 1993. *Partisipasi Wanita Dalam Usaha Mencari Nafkah Pada Berbagai Bidang Pekerjaan di Sulawesi Selatan*. Lembaga Penelitian Unhas

Ujung Pandang. Edisi Mei 1993
Siagian, Faizal. 1993. "Marginalisasi Wanita dalam Industrialisasi Bercorak
Kapitalis".
Analisis CSIS. November-Desember, No.6 Tahun. XXII.